



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
**SUB UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GUNTUR IMAN NEFIANTO
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
3. NHK : 62839

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.372.324.560

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 256.500.000
2. Bangunan Seluas 32 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/21 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 163.370.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 120.603.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/34 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 687.851.560

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 14.250.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.750.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 11.990.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.125.898.699**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.524.463.259

**III. HUTANG** Rp. 256.000.000



## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.268.463.259

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.